

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

India merupakan salah satu negara di kawasan Asia Selatan yang masih kental akan unsur-unsur kebudayanya, seperti dalam sistem sosialnya yaitu kasta, yang merupakan bentuk dari warisan kebudayaan yang tidak akan hilang dimakan zaman. Dalam sistem tersebut (kasta), tergambar adanya tingkatan dan batasan-batasan di dalam kehidupan sosial dan politiknya. Namun, hal itu sudah menjadi ciri khusus bagi negara India yang identik dengan nilai-nilai budaya.

Perjuangan India untuk meraih kemerdekaan tidaklah mudah, karena berkali-kali rakyat India melakukan perlawanan melawan Inggris, tetapi selalu gagal. Meski demikian, rakyat India tidak mengenal menyerah karena pada tanggal 15 Agustus 1825 secara serentak menandatangani kesepakatan untuk mengusir Inggris.

Setelah itu, perlawanan yang berupa melakukan pertempuran melawan Inggris direalisasikan pada 15 Agustus 1857. Waktu itu tentara India yang masih berada di bawah komandan Inggris, berhasil mengusai Delhi yang merupakan Ibukota India. Kemenangan tentara India dalam melawan tentara Inggris dimanfaatkan untuk membebaskan rakyat yang berada di bawah pendudukan penjajah.

Perjalanan rakyat India selanjutnya yakni pada tahun 1895 mendirikan

menjadi lebih terorganisasi dan semakin kuat. Apalagi setelah Mahatma Gandhi bergabung dengan partai tersebut dan memimpin kebangkitan India sehingga perlawanan rakyat India semakin besar sampai pada akhirnya di tahun 1947 Inggris terpaksa melepas wilayah jajahannya yang terluas dan terpenting. Namun, setahun kemudian Mahatma Gandhi di bunuh pada tahun 1950.

Setelah lepas dari jajahan negara Inggris pada tanggal 15 Agustus 1947¹, India diwarisi sistem politik yang sub-continent, dimana politik dijadikan sebagai peran sentral dalam pemerintahan yang berlandaskan demokrasi.. Dari sinilah titik awal proses berkembangnya perpolitikan India dimulai..

Bila dikaitkan antara sistem pemerintahan yang berlandaskan demokrasi dengan pola kehidupan masyarakat di India ternyata tidak berjalan selaras. Itu terjadi karena adanya kesenjangan dalam prosesnya sehingga menimbulkan efek yang negatif. Contohnya, adanya kesenjangan dalam sosialisasi hak berpolitik bagi masyarakat India yang selalu terjebak pada pembagian kasta sehingga tidak menutup kemungkinan akan timbulnya konflik, karena dalam negara yang berdasarkan demokrasi tidak akan dapat menghindarkan banyaknya tuntutan kebebasan akan hak.

Dengan adanya fenomena tersebut, telah memberikan gambaran. Se jauh mana tingkat kekerasan dalam perpolitikan di negara India yang berlandaskan prinsip demokrasi. Berangkat dari persoalan-persoalan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengaruh demokrasi dalam fenomena kekerasan politikan di negara Hindustan tersebut.

B. Tujuan Penulisan

1. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem sosial (kasta) terhadap proses perpolitik di India.
2. Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Sebagai wadah untuk pendalaman ilmu pengetahuan jurusan hubungan internasional.
4. Dimaksudkan untuk mengaplikasi teori-teori Hubungan Internasional, khususnya berkenaan dengan pembuktian hipotesa dan menjawab permasalahan.

C. Latar Belakang Masalah

India merupakan salah satu negara berkembang yang selalu menghadapi berbagai macam persoalan, hal yang melatar belakanginya adalah India sebagai pusat kebudayaan yang menciptakan stratifikasi sosial, sehingga peranan kebudayaan sangat mendominasi serta mewarnai sistem politiknya, hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya juga merupakan salah satu pengaruh penting bagi sistem politik dan menyebabkan seseorang atau masyarakat cenderung mengikuti pola-pola tertentu dalam kehidupan politiknya.²

² Donald Eugene Smith, *Agama dan Modern Politik*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm.2

Keanekaragaman kelompok etnis, budaya, bahasa, dan agama merupakan corak yang mewarnai kehidupan masyarakat India, dimana masing-masing memiliki kelompok mayoritas serta mempunyai kepentingan agar diakui secara umum serta ditetapkan UUD, dan juga pada umumnya bersifat hirarkis dalam arti ada hubungan antara atasan dengan bawahan semacam *patron client*,³ sehingga dapat menimbulkan akumulasi berbagai masalah seperti kerusuhan rasial, kasta, agama, bahasa, dan kebudayaan, yang merupakan ancaman nyata bagi kehidupan politik di India, dimana akan mengundang timbulnya krisis identitas, legitimasi, partisipasi, demokrasi maupun integrasi.

Sejarah India dibagi dalam 3 fase. Fase pertama berkaitan dengan kemenangan Islam di India pada abad ke-18 dan abad pertengahan. Fase kedua pada masa penjajahan Inggris, kira-kira tahun 1757 sampai kemerdekaan India pada tahun 1947. Fase ketiga meliputi masa kemerdekaan India sebagai negara baru sejak 1947.

Pada awal perjalanan sejarahnya, India sudah melekat dengan apa yang dinamakan konflik dan kekerasan, sebagai contohnya ; pada masa pertengahan yang pada saat itu dipimpin oleh kesultanan Delhi dan dinasti Mughal, disebut-sebut sebagai masa penindasan penduduk asli yang beragama Hindu dibawah kekuasaan "Penjajah Muslim", seperti pemaksaan secara kekerasan terhadap kaum Hindu untuk memeluk agama islam dan melarang kegiatan yang berbau Hinduisme, sehingga berujung pada konflik antara Hindu dan Muslim. Hal

³ Bambang Cipto, *Diktat Kuliah Asia Selatan*, Diktat Tak Diterbitkan, UMY, Yogyakarta, tt, hal.3.

tersebut terjadi karena, pada saat itu Islam menjadi bagian dari tradisi anak benua India sejak masa "pertengahan" (*medieval*).⁴

India menyatakan diri merdeka dari penjajahan Inggris pada tanggal 15 Agustus 1947. Pasca kemerdekaan, bangsa India bekerja keras untuk menentukan sistem politik negaranya. Dengan semangat nasionalismenya yang besar, telah memicu bangsa negara tersebut untuk menjadi negara demokratis terbesar di dunia, partai-partai politik, LSM-LSM, dan media tumbuh pesat sebagai pilar-pilar demokrasi.

India memiliki sistem politik yang demokratis, salah satunya adalah prinsip yang telah dicetuskan oleh Partai Kongres yaitu prinsip yang dinamakan sekulerisme, dimana ada batasan antara agama serta etnisitas dengan negara, hal ini bertujuan untuk memayungi semua kepentingan masyarakat di India, sehingga tercipta kerukunan hidup masyarakat yang berbeda satu sama lain, prinsip inilah yang menjadi titik awal perjalanan demokrasi di negara India.

Selain itu, dalam konstitusinya juga menjamin hak segenap rakyatnya, diantaranya ; hak persamaan status, hak kebebasan, hak melawan eksploitasi, kebebasan beragama, hak mendapatkan pendidikan, serta hak untuk berperan dalam politik. Semua hak tersebut tertulis di dalam konstitusi, pasal 12 sampai dengan 31.⁵ Namun, dalam realitas sosial-ekonominya, India selalu dibenturkan pada masalah-masalah kesenjangan dan ketidakadilan seperti yang disebabkan oleh sistem kasta, perbedaan kelas masyarakat, sub-ordinasi wanita terhadap pria,

⁴ Peter Hardy, *Historians of Medieval India: Studies in Indo-Muslim Historical Writing* (New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1997), 123.

⁵ *Ibid*, hal.6.

agama, serta kemiskinan, dan yang lebih menakutkan lagi, yakni dapat menimbulkan tindak-tanduk kekerasan yang berbau politik.

Kehidupan politik di India, terkadang disertai dengan peristiwa berdarah, misalnya : pembunuhan Perdana Menteri (PM) Indira Gandhi pada tahun 1984, yang merupakan keturunan dari PM pertama India yaitu Jawaharlal Nehru, pada waktu itu Indira dibunuh oleh pengawalnya sendiri yang merupakan pemeluk Sikhisme. Diduga ini ada kaitannya dengan serbuan India ke Amritsar, kota suci kaum Sikh.⁶ Kekerasan kembali terjadi, kali ini terhadap anaknya PM Rajiv Gandhi pada tahun 1991, Ia dibunuh oleh separatis Tamil dari Sri Lanka, Thenmuli Rajaratnam yang saat itu mengalungkan rangkaian bunga ke lehernya yang ternyata berisi bom.⁷

Tidak hanya itu, prinsip sekulerisme yang seharusnya berjalan dengan religiusitas di tengah-tengah masyarakat India kini pun mulai memudar. Berbagai permasalahan timbul seperti pertentangan umat beragama antara Hindu dengan Muslim di India, berbagai kekerasan pun terjadi. Ditambah lagi semenjak berdirinya Bharatiya Janata Party yang banyak didukung oleh kaum Hindutav yang merupakan mayoritas penduduk asli beragama Hindu di India, yang menginginkan adanya pembentukan negara Hindu di India serta sangat anti terhadap sekulerisme.

⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Indira_Gandhi, diakses pada tanggal 14 November 2006, 14:00 WIB.

⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Rajiv_Gandhi, diakses pada tanggal 14 November 2006, 14:00 WIB.

Dalam prosesnya BJP menghasut masyarakat Hindu untuk bersatu melawan muslim dan mengandalkan jalan kekerasan, seperti kasus Ayodya dinegara bagian Uttar Pradesh pada Desember 1992, serangan kelompok fundamentalis Hindu pendukung BJP ke masjid Babri yang dibangun pada abad ke-16 yang merupakan kekayaan budaya India dan menjadi tempat beribadat kaum Muslim, telah menewaskan ± 2000 orang.⁸ Karena hal itulah, komunitas Hindu dan Muslim terpecah-belah, dan dalam kasus tersebut tidak menutup kemungkinan akan berujung kepada masalah etnis dan budaya.

Setelah partai Conggres menang kembali dan berkuasa dalam pemilu pada tahun 2004,⁹ yang pada saat itu dipimpin oleh Sonia Gandhi yang merupakan istri dari mantan Perdana Menteri Rajiv Gandhi, Sonia mengalah calon kandidat lainnya yaitu Manmohan Singh memperoleh jumlah suara 12 persen, sedangkan Atal Bihari Vajpayee yang tergusur dari jabatannya pada pemilu India 2004 menempati urutan kedua dengan 18,5 persen. Namun, Sonia Gandhi menolak jabatan Perdana Menteri setelah munculnya oposisi dari nasionalis Hindu yang menganggap dirinya bukanlah keturunan asli India melainkan Italia. Keputusan itu justru mengundang simpati rakyat India,¹⁰ dan sonia pun harus merelakan kursi kepemimpinan PM ke tangan Manmohan Singh, yang sebelumnya akan direncanakan oleh Partai Kongres Untuk menduduki menteri keuangan (menkeu) jika Sonia Gandhi terpilih menjadi PM. Namun, semenjak kemenangan dipegang

⁸ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0404/26/swara/989156.htm> Senin, 26 April 2004. 13:30 WIB.

⁹ www.kompas.com, senin 17 Mei 2004, diakses 11 November 2006. 16:45 WIB.

¹⁰ www.kompas.com, senin 17 Mei 2004, diakses 11 November 2006. 16:45 WIB.

oleh Partai Kongres dan Manmohan Singh sebagai Perdana Menteri, roda pemerintahan tetap saja tidak berjalan dengan baik.

Seperti baru-baru ini yang terjadi di kota Assam di kawasan timur laut India, Dua ledakan mengguncang kawasan tersebut, Ahad (5/11/2006). Ledakan pertama meluluhlantakkan pasar yang tengah ramai pembeli. Lima orang tewas dan 15 lainnya terluka. Ledakan serupa menghantam kawasan permukiman warga setengah jam kemudian dan merenggut tiga korban jiwa serta mencederai lima lainnya. Dari seluruh jumlah korban luka, 15 di antaranya kritis.

Dalam kejadian tersebut, belum ada pihak yang bertanggung jawab atas ledakan bom rakitan itu. Namun Kepala Kepolisian Negara Bagian Assam Deepak Narayan Dutt meyakini kelompok Front Pembebasan Assam Bersatu (ULFA) berada di balik aksi ini.¹¹ Dari gambaran tersebut, dapat terlihat proses perjalanan demokrasi setelah beberapa kali pergantian kekuasaan dianggap hanya berjalan ditempat.

Hal itulah yang menjadikan negara India penuh keajaiban dan pertentangan, sehingga sering terjadinya kemelut berbau primordial yang menyebar dalam spektrum politik India, hal ini dapat dilihat dari hubungan antar masyarakat minoritas dengan mayoritas, sehingga dapat muncul pola hubungan negatif berdimensi primordialisme yang belum dapat diatasi oleh pemerintah India.

¹¹ <http://www.liputan6.com/view/9,132006,1,0,1.html>, diakses pada tanggal 1-1 November 2006, 12:00 WIB.

Melihat fenomena kekerasan politik di dalam demokrasi India tersebut, kita dapat melihat bahwa sistem demokrasi sangat berpengaruh. Dan juga dapat menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bagi pemerintahan negara India. Sehingga terkadang konstitusi berprinsip demokrasi menjadi terlupakan fungsinya.

Masih banyaknya kebudayaan-kebudayaan yang mewarnai kehidupan politik masyarakat di India, seperti dalam sistem sosialnya sangat memberikan pengaruh terhadap perpolitikan di India, yang terkadang menyebabkan terjadinya konflik primordialisme yang sulit diatasi, sehingga dalam alasan pemilihan judul ini, mengambil judul "*Fenomena Kekerasan politik Dalam Demokrasi di India*"

D. Pokok Permasalahan

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan oleh penulis diatas, maka penulis memilih topik permasalahan sebagai berikut :

"Mengapa demokrasi di India masih diwarnai tindak-tindak kekerasan politik?"

E. Kerangka Dasar Teori

Teori Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan, yang ditata dengan memadukan nilai-nilai liberal, pemerintahan berdasarkan hukum dan berdasarkan pemilu bebas.¹²

Istilah demokrasi berasal dari negara Yunani yang berarti "*demos*" (rakyat) dan "*kratein*" (memerintah) yang maksudnya adalah "cara memerintah negara oleh rakyat"

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat dan memberikan jaminan atas hak asasi manusia serta adanya kebebasan yang diberikan kepada masyarakatnya tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan.

Dalam perkembangannya konsep demokrasi merupakan konsep yang ideal bagi sistem pemerintahan di suatu negara karena sistem inilah yang paling dianggap mengedepankan persamaan hak sesama manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme atau kemanusiaan.

Sistem politik demokrasi dapat didefinisikan berdasarkan tipologi yang di bentuk melalui kombinasi antara parameter kultur politik dan perilaku elite masing-masing. Seperti sistem tipologi yang dijelaskan oleh Arend LijPhart, dalam penjelasannya demokrasi dibedakan melalui empat sistem yang berdasarkan kriteria yaitu :

1. Demokrasi yang Depolitized (paling stabil).
2. Demokrasi yang sentripetal (ada pertikaian antara elite tetapi diikat oleh kesepakatan ideologis).
3. Demokrasi yang konsosiasional (masyarakat yang memiliki tipe kultur

4. Demokrasi yang sentrifugal (paling tidak stabil, karena elit saling bertikai sedang kesepakatan ideologi tidak jelas).¹³

Yang pertama dan kedua memiliki kesamaan sebagai dua sistem demokrasi yang berkembang di dalam konteks kebudayaan politik yang bersifat "homogeneous," akan tetapi berbeda satu sama lain dalam hal bahwa yang pertama melibatkan koalisi elite politik sementara yang kedua komposisi elite. Sebaliknya sistem demokrasi yang ketiga dan keempat memiliki kesamaan dalam hal bahwa keduanya berkembang dalam konteks kebudayaan politik yang bersifat "fragmented," akan tetapi berbeda dalam hal bahwa yang pertama di dukung oleh koalisi elit politik sementara kedua oleh komposisi elit.

Selanjutnya pada kesempatan lain, Robert A. Dahl mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem politik di mana para anggotanya saling memenadang antara satu dengan yang lainnya sebagai orang-orang yang sama dipandang dari segi politik dan mereka itu secara bersama-sama adalah daulat dan memiliki segala kemampuan, sumber daya dan lembaga-lembaga yang mereka perlukan demi untuk memerintah mereka sendiri.¹⁴

Sebagai sebuah ideologi, demokrasi mempunyai nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dikedepankan dalam menata sistem pemerintahan, negara dan masyarakat. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip demokrasi itu adalah :

- Jika sarana pemaksaan dengan kekerasan dinetralkan.
- Jika memiliki masyarakat majemuk yang dinamis dan modern.

¹³ Afrend LijPhrant, "Typologies of democratic system," *Comparative Political Studies*, (April 1978), dalam Mochtar Mas'oeed. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm.222

¹⁴ Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics*, New Haven, 1957, hlm. 11

- Keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik.
- Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara.
- Tingkat kebebasan dan kemerdekaanya tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara.
- Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.¹⁵

Sehingga untuk menjamin agar pemerintah selalu tanggap terhadap kehendak rakyat, atau dengan kata lain, berperilaku demokratis maka rakyat diberikan kesempatan : *pertama* merumuskan preferensi atau kepentingannya sendiri; *kedua*, memberitahukan perihal preferensinya itu kepada sesama warga negara dan kepada pemerintah melalui tindakan individual maupun kolektif; dan *ketiga*, mengusahakan agar kepentingannya itu dipertimbangkan secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah. Artinya tidak didiskriminasikan berdasar isi atau asal-usulnya.

Dalam demokrasi, untuk memperjuangkan “keterbukaan” politik sangatlah tidak mudah. Prosesnya melibatkan pertentangan kepentingan antara pemerintah dengan yang diperintah. Semakin besar perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan kelompok non-pemerintah, semakin besar pula kemungkinan bahwa masing-masing akan menolak memberi peluang kepada pihak lain untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembuatan keputusan. Dengan kata lain, semakin besar pertentangan antara pemerintah dengan kelompok lawannya itu, semakin mahal “ongkos” toleransi yang harus ditanggung masing-masing.

Artinya, semakin kecil kemungkinan masing-masing untuk mentolerir tindakan lawan.¹⁶

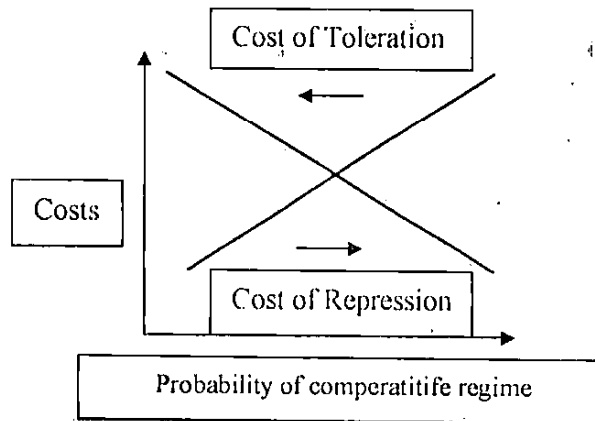
Dahl mengajukan tiga aksioma tentang kemungkinan pemerintah mentolerir penentangan oleh kekuatan non-pemerintah. Aksioma 1: kemungkinan suatu pemerintah akan mentolerir oposisi akan meningkat kalau “ongkos” untuk bertoleransi bisa diperkirakan turun. Aksioma 2: kemungkinan suatu pemerintah akan mentolerir oposisi akan meningkat kalau “ongkos” untuk menindasnya diperkirakan meningkat. Dengan demikian, kemungkinan demokrasi tergantung pada dua “ongkos” itu, seperti disebut dalam aksioma 3: semakin tinggi “ongkos” penindasan melalui “ongkos” toleransi, semakin besar kemungkinan munculnya sistem politik yang kompetitif atau demokratis.

Menurut aksioma 3 ini, semakin besar biaya toleransi, semakin besar jaminan keamanan bagi pemerintah. Semakin besar biaya penindasan semakin besar jaminan keamanan bagi kelompok non-pemerintah. Karena itu kondisi yang bisa memberi “jaminan keamanan timbal balik” pada pemerintah akan cenderung melahirkan kesempatan bagi kelompok non-pemerintah untuk bersaing memperebutkan jabatan publik.¹⁷

¹⁶ Mochtar Mas'ood, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 12.

¹⁷ Robert A. Dahl, *Polyarchy: Participation an Opposition*, Conn: Yale University Press, 1971, hlm. 14-16

Aksioma 3 dapat diilustrasikan seperti pada grafik dibawah ini :



Sumber: Robert A, Dahl (*Polyarchy: Participation and Opposistio*, 1973:16)

Dari beberapa penjelasan diatas, bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang berat, rumit dan sangat sulit. Karena, dalam prosesnya sering muncul ketegangan dan pertentangan serta mensyaratkan ketekunan para penyelenggaraannya agar bisa berhasil.

India, misalnya, adalah negara yang menggunakan sistem pemerintahan konstitusi sebagai dasar demokrasi. Namun, dalam prosesnya sering terjadi ketegangan dan pertentangan sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi konflik dalam hal persaingan antar elite. Biasanya, hal tersebut dilatarbelakangi oleh persaingan didalam perpolitikan, dalam prosesnya tidak menutup kemungkinan menggunakan jalur kekerasan.

Terlebih lagi India sebagai negara sekuler, yang memberikan ruangan antara negara dan agama, Karena masih lemahnya prinsip demokrasi yang

diterapkan di India telah melatar belakangi timbulnya konflik-konflik yang terjadi seperti adanya pergerakan yang dilakukan oleh kaum Hinduisme yang tidak menginginkan adanya negara sekuler yang cenderung menginginkan adanya bentuk negara Hindu.

Hal itulah yang memberikan dampak yang sangat besar bagi perpolitikan di India. Karena, setiap partai di India merupakan perwakilan dari tiap-tiap kasta, dan setiap partai biasanya dipimpin oleh tokoh kasta terkemuka. Jadi, hal yang paling ditakutkan adalah jika ketegangan dan pertentangan sudah masuk di dalam sistem perpolitikan.

F. Hipotesis

Berdasarkan kerangka landasan teori di atas, maka dapat ditarik suatu hipotesa sebagai berikut :

Sistem demokrasi yang menjadi landasan sistem konstitusi di India, masih diwarnai dengan berbagai tindak kekerasan karena :

- Tingginya tingkat konflik di dalam ruang lingkup sosial dan politik yang berujung pada kekerasan.
- Tingginya tuntutan yang dilakukan oleh kelompok, sehingga

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan ilmiah terdapat beberapa metode yang berfungsi untuk mempertegas proses penelitian, diantaranya ; eksplanasi, deskripsi, eksplorasi, prediksi, dan preskripsi.

Disini penulis mencoba membahas masalah dengan metode eksplanasi, yang tujuannya untuk menjelaskan sumber permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Maka, dengan tujuan agar tulisan ini dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya, diperlukan data-data yang akurat dan terpercaya. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai sumber antara lain ;

Studi Pustaka merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber data yang tertulis, seperti : buku-buku, majalah, kliping, Koran jurnal website dan sebagainya.

Dengan banyaknya subjek yang didapat, maka penelitian ini dapat menganalisa sesuatu secara keseluruhan kepada bagian-bagian, dan menjelaskan tahap akhir dari proses perkembangan yang sebelumnya lebih sederhana, sehingga mencapai suatu kesimpulan dalam penulisan ini.

H. Jangkauan Penulis

Fokus utama dari penulisan ini adalah kekerasan politik dalam demokrasi di India. Materi yang akan di bahas dalam penulisan ini yaitu tentang sejauh mana tindak-tanduk kekerasan yang terjadi di dalam demokrasi India sebelum dan setelah merdeka, seperti pergolakan politik yang dilakukan beberapa kaum yang

India. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan apabila penulis menjelaskan di luar batasan tersebut untuk memperkuat dan dapat dijadikan data pendukung penulisan, dalam catatan diperhatikan relevansinya.

I. Sistematika Penulisan

Dalam tulisan ini maka penulis menggunakan kerangka karangan sebagai berikut :

Bab I : Berisi tentang pendahuluan yang memuat tentang: Alasan Pemilihan Judul, Tujuan penulis, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Jangkauan Penulis, Metode Penelitian, Sistematika Penulis, Kerangka Penulis.

Bab II : Dalam bab ini akan membahas tentang sistem politik di India, yang diantaranya ; Struktur pemerintahan, Institusi dan Lembaga politik India, Pemerintahan Negara Bagian, Negara Sekuler di India, Sistem Kepartaian di India, Sistem pemilu di India.

Bab III : Bab ini akan membahas mengenai tingginya tingkat konflik di dalam ruang lingkup sosial dan politik, geografis India, dan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya konflik di India.

Bab IV: Bab ini menjelaskan tentang tingginya tingkat tuntutan antar kelompok, faktor-faktor yang membuat pemerintah lemah terhadap tekanan tersebut.

Bab V : Kesimpulan